

Optimalisasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia Menghadapi Ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* pada Era Kompetisi Geostrategis Global di Indo-Pasifik

Nefra Firdaus¹, Lukman Yudho Prakoso^{2*}, Muhammad Ali³, Muhamad Risahdi⁴,
Wisnu Pramandita⁵
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia^{1,2,4}
Akademi Angkatan Laut Surabaya, Indonesia^{3,5}
Email: lukman.prakoso@idu.ac.id^{2*}

Keywords:

Grey Zone Warfare;
Maritime Hybrid Threats;
Maritime Governance;
Maritime Security;
Indo-Pacific.

Abstract

The contemporary global strategic environment is increasingly characterized by the use of Grey Zone Warfare and Maritime Hybrid Threats by both state and non-state actors to achieve political, economic, and security objectives without triggering open conflict. As a center of economic growth and geopolitical competition, the Indo-Pacific region has become highly vulnerable to such threats. Indonesia, as the world's largest archipelagic state, faces significant challenges in safeguarding maritime sovereignty, securing international trade routes, and maintaining national maritime security stability. This study aims to analyze the current implementation of Indonesia's maritime security governance in addressing Grey Zone Warfare and Maritime Hybrid Threats and to formulate an adaptive and resilient maritime governance strategy. The study employs a descriptive qualitative method using a case study approach and SWOT analysis. The findings indicate that strengthening integrated maritime governance, Maritime Domain Awareness, maritime diplomacy, digital transformation, and interagency synergy are critical factors in enhancing Indonesia's maritime security resilience amid global geostrategic competition. The research concludes that strengthening integrated maritime governance, Maritime Domain Awareness, maritime diplomacy, digital transformation, and inter-institutional synergy are key factors in increasing Indonesia's maritime security resilience in the era of global geostrategic competition.

Kata Kunci:

Grey Zone Warfare;
Maritime Hybrid Threats;
Tata Kelola Maritim;
Keamanan Maritim;
Indo-Pasifik.

Abstrak

Perkembangan lingkungan strategis global menunjukkan meningkatnya penggunaan strategi *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* oleh berbagai aktor negara maupun non-negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan keamanan tanpa memicu konflik terbuka. Kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan persaingan geopolitik global menjadi wilayah yang rentan terhadap berbagai bentuk ancaman tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah, keamanan jalur perdagangan internasional, serta stabilitas keamanan maritim nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* serta merumuskan strategi optimalisasi tata kelola keamanan maritim yang adaptif dan resilien. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola maritim terintegrasi, *Maritime Domain Awareness*, diplomasi maritim, transformasi digital, dan sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan resiliensi keamanan maritim Indonesia di era kompetisi geostrategis global. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola maritim terintegrasi,

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan strategis global pada abad ke-21 telah melahirkan bentuk-bentuk ancaman baru yang semakin kompleks, multidimensional, dan sulit diidentifikasi melalui pendekatan keamanan tradisional. Salah satu bentuk ancaman yang berkembang pesat adalah *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats*, yaitu strategi yang memadukan instrumen militer, ekonomi, teknologi, informasi, hukum, dan aktor non-negara untuk mencapai tujuan strategis tanpa memicu perang terbuka (Mazarr, 2015). Karakteristik ancaman tersebut berada di antara kondisi damai dan konflik bersenjata, sehingga sering kali sulit dideteksi dan direspons secara efektif oleh negara (Badan Keamanan Laut Republik, 2024).

Dalam konteks maritim, *Grey Zone Warfare* dapat berupa penggunaan kapal penjaga pantai (*coast guard*), kapal nelayan milisi, operasi informasi, serangan siber terhadap infrastruktur pelabuhan, manipulasi hukum laut, eksploitasi sumber daya secara ilegal, hingga tekanan ekonomi terhadap negara tertentu. Sementara itu, *Maritime Hybrid Threats* mencakup kombinasi ancaman tradisional dan non-tradisional yang menargetkan keamanan maritim, rantai pasok global, stabilitas ekonomi, dan keamanan manusia (Hoffman, 2007).

Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi episentrum kompetisi geostrategis global yang melibatkan berbagai kekuatan besar dunia. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2024), lebih dari 80% volume perdagangan dunia diangkut melalui laut dan sebagian besar melewati kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini juga menjadi arena rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin intensif dalam bidang ekonomi, teknologi, pertahanan, dan keamanan maritim.

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam dinamika tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sekitar 6,4 juta km², lebih dari 17.000 pulau, dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Indonesia menjadi salah satu simpul utama jalur perdagangan internasional (Prakoso, 2021). Data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 90.000 kapal internasional melintasi perairan Indonesia setiap tahun. Kondisi tersebut menjadikan keamanan maritim sebagai aspek vital dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya tata kelola keamanan maritim yang terintegrasi, adaptif, dan mampu mengantisipasi berbagai ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats*. Tata kelola tersebut harus mampu menjamin keamanan jalur pelayaran, melindungi sumber daya maritim, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan laut, dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global. Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa tata kelola keamanan maritim Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terdapat fragmentasi kewenangan antarinstansi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan koordinasi. Kedua, kemampuan *Maritime Domain Awareness* nasional belum sepenuhnya terintegrasi. Ketiga, perkembangan ancaman siber maritim, disinformasi, dan tekanan geopolitik berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan adaptasi kebijakan yang ada.

Keempat, meningkatnya aktivitas *Grey Zone Warfare* di kawasan Indo-Pasifik berpotensi mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia, khususnya di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara dan ALKI (Prakoso et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek *Grey Zone Warfare*, *Maritime Hybrid Threats*, dan tata kelola keamanan maritim. Penelitian oleh Mazarr (2015) mengkaji konsep *Grey Zone Warfare* sebagai strategi di bawah ambang batas konflik terbuka yang digunakan negara-negara untuk mencapai tujuan strategis tanpa memicu perang. Hoffman (2007) mengembangkan konsep *Hybrid Threats* yang menggabungkan ancaman militer dan non-militer yang sulit diidentifikasi. (Bueger, 2015) mengembangkan konsep empat matriks keamanan maritim (*Sea Power*, *Economic Development*, *Human Security*, dan *Marine Environment*) sebagai kerangka komprehensif untuk memahami keamanan maritim. Prakoso (2020; 2021; 2022) meneliti implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia, geostrategi maritim, dan transformasi keamanan maritim menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian oleh NATO Hybrid CoE (2024) menyoroti lanskap ancaman hibrida global dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Penelitian tentang ancaman siber maritim dilakukan oleh (BSSN, 2024) yang mencatat peningkatan insiden siber maritim di Indonesia. Penelitian tentang tata kelola keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik telah dilakukan oleh (Scott, 2019) dan (Till, 2018) yang membahas konsep kekuatan maritim dalam konteks kontemporer. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek ancaman atau tata kelola secara terpisah, dan belum banyak yang mengintegrasikan ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* dalam satu kerangka analisis tata kelola keamanan maritim Indonesia. Penelitian tentang implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia juga masih terbatas pada aspek pertahanan dan belum banyak yang mengkaitkannya dengan tata kelola maritim, transformasi digital, dan sinergi antarlembaga secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* serta merumuskan strategi optimalisasi tata kelola yang adaptif dan resilien. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* dalam satu kerangka analisis tata kelola keamanan maritim Indonesia, penggabungan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Prakoso dan Matriks Keamanan Maritim Bueger dalam konteks Indonesia, penggunaan analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimalisasi tata kelola, serta proyeksi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 yang belum banyak dilakukan dalam studi keamanan maritim sebelumnya. Menurut (Christian Bueger, 2015), keamanan maritim harus dipahami sebagai hubungan yang saling memengaruhi antara empat dimensi utama, yaitu *Sea Power*, *Economic Development*, *Human Security*, dan *Marine Environment*. Pendekatan ini menjadi sangat relevan karena ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* tidak hanya memengaruhi aspek pertahanan, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi, lingkungan laut, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori implementasi kebijakan keamanan maritim yang dikembangkan oleh (Prakoso, 2020) menekankan pentingnya integrasi, interaksi, transparansi, pengendalian, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi sebagai faktor utama keberhasilan tata kelola keamanan maritim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats*, dan bagaimana strategi optimalisasi tata kelola keamanan maritim Indonesia yang mampu meningkatkan resiliensi nasional dalam menghadapi kompetisi geostrategis global di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* serta merumuskan strategi optimalisasi tata kelola keamanan maritim yang adaptif dan resilien. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian keamanan maritim dan geopolitik dengan mengintegrasikan ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* dalam kerangka tata kelola keamanan maritim Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan keamanan maritim di negara kepulauan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, TNI AL, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Siber dan Sandi Negara, serta pemangku kepentingan maritim lainnya dalam merumuskan strategi tata kelola keamanan maritim yang adaptif terhadap ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats*, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan keamanan nasional dan diplomasi maritim, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji lebih dalam tentang tata kelola keamanan maritim dan ancaman hibrida di kawasan Indo-Pasifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus strategis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena keamanan maritim yang kompleks, multidimensional, dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan keamanan (Creswell & Creswell, 2018).

Desain studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* pada era kompetisi geostrategis Indo-Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara kebijakan, institusi, dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Objek penelitian mencakup tata kelola keamanan maritim nasional yang melibatkan Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Luar Negeri, serta berbagai pemangku kepentingan maritim lainnya. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas tata kelola keamanan maritim dalam mengantisipasi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats*.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan akademisi keamanan maritim, praktisi pertahanan, pejabat pemerintah, dan pakar geopolitik. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan nasional, laporan UNCTAD, *International Maritime Organization* (IMO), *International Maritime*

Bureau (IMB), NATO Hybrid Centre of Excellence, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, serta berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020) yang mencakup dimensi *integration, interaction, transparency, control, accountability, confidentiality, dan regulation*.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian menggunakan pendekatan Maritime Security Matrix Christian Bueger (2015) yang terdiri atas *Sea Power, Economic Development, Human Security, dan Marine Environment*. Pendekatan tersebut dipadukan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimalisasi tata kelola keamanan maritim Indonesia yang adaptif terhadap ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats*.

Kerangka analisis penelitian dimulai dari identifikasi ancaman *Grey Zone Warfare* dan *Maritime Hybrid Threats* sebagai variabel eksternal, dilanjutkan dengan analisis implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia saat ini, identifikasi kekuatan dan kelemahan nasional, serta penyusunan strategi optimalisasi tata kelola keamanan maritim menuju Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Perang Zona Abu-abu dan Ancaman Hibrida Maritim

Perkembangan dalam lingkungan strategis Indo-Pasifik menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan maritim tidak lagi didominasi oleh konflik antarnegara konvensional. Saat ini, berbagai negara dan aktor non-negara cenderung menggunakan pendekatan Perang Zona Abu-abu dan Ancaman Hibrida Maritim untuk mencapai tujuan strategis tanpa memicu perang terbuka. Ancaman-ancaman ini berada di bawah ambang batas konflik bersenjata, sehingga seringkali sulit untuk diidentifikasi, dibuktikan, dan ditanggapi menggunakan instrumen keamanan tradisional (Mazarr, 2015).

Dalam konteks maritim, Perang Zona Abu-abu dimanifestasikan melalui penggunaan kapal penjaga pantai, milisi maritim, kegiatan perikanan terorganisir, tekanan ekonomi, manipulasi hukum internasional, operasi informasi, dan serangan siber terhadap infrastruktur maritim. Sementara itu, Ancaman Hibrida Maritim menggabungkan ancaman militer, ekonomi, teknologi, informasi, dan kriminal transnasional yang dapat mengganggu stabilitas keamanan maritim nasional (Hoffman, 2007).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman-ancaman ini. Lokasinya yang strategis menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, bersama dengan keberadaan tiga Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu jalur terpenting dalam sistem perdagangan internasional (Prakoso, 2021).

Menurut data dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD, 2024), sekitar 80% perdagangan global diangkut melalui laut,

dengan sebagian besar melewati kawasan Indo-Pasifik. Situasi ini menjadikan keamanan maritim Indonesia bukan hanya masalah kepentingan nasional tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan global.

Untuk menganalisis implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020) yang mencakup tujuh dimensi utama: integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi.

Karakteristik Perang Zona Abu-abu dan Ancaman Hibrida Maritim di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman Perang Zona Abu-abu dan Ancaman Hibrida Maritim yang berpotensi mempengaruhi Indonesia dapat dikategorikan menjadi enam bentuk utama.

- Pertama, **Operasi Milisi Maritim**, yaitu penggunaan kapal nelayan atau kapal sipil terorganisir untuk mendukung kepentingan strategis suatu negara tertentu.
- Kedua, **Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUUF)** yang seringkali tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pengaruh geopolitik.
- Ketiga, **Ancaman Siber Maritim**, yaitu serangan terhadap sistem pelabuhan, navigasi kapal, logistik maritim, dan pusat data perkapalan.
- Keempat, **Perang Informasi**, dalam bentuk penyebaran disinformasi, propaganda digital, dan manipulasi opini publik terkait isu-isu maritim.
- Kelima, **Paksaan Ekonomi**, yaitu penggunaan instrumen ekonomi dan perdagangan untuk menekan kebijakan suatu negara.
- Keenam, **Lawfare**, yaitu penggunaan selektif instrumen hukum internasional untuk memperkuat klaim dan kepentingan geopolitik tertentu.

Ancaman-ancaman ini berkembang secara bersamaan, sehingga membutuhkan sistem tata kelola keamanan maritim yang adaptif dan terintegrasi.

Analisis Implementasi Berdasarkan Dimensi Integrasi

Dimensi integrasi mengukur tingkat integrasi antar lembaga dalam menerapkan kebijakan keamanan maritim.

Saat ini Indonesia memiliki berbagai lembaga yang berperan dalam keamanan maritim, termasuk Bakamla, Angkatan Laut Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Polairud, Bea Cukai, Badan Siber dan Kriptografi Nasional, dan pemerintah daerah pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga telah meningkat melalui pembentukan berbagai forum koordinasi nasional dan penguatan peran Bakamla sebagai penjaga pantai Indonesia. Namun, tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi data masih terjadi, sehingga mengakibatkan integrasi proses pengambilan keputusan yang tidak lengkap.

Menurut Prakoso (2020), integrasi kelembagaan merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan keamanan maritim karena memungkinkan pertukaran informasi dan respons yang lebih cepat terhadap ancaman.

Analisis Implementasi Berdasarkan Dimensi Interaksi

Dimensi interaksi berkaitan dengan intensitas komunikasi dan kerja sama antara aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola keamanan maritim.

Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cukup aktif dalam berbagai forum kerja sama maritim regional dan internasional seperti Forum Maritim ASEAN, Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus), Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA), dan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik.

Selain itu, interaksi antar lembaga nasional telah meningkat melalui berbagai latihan bersama, patroli terpadu, dan pertukaran informasi keamanan maritim. Namun, peningkatan interoperabilitas sistem informasi maritim nasional masih diperlukan untuk memastikan bahwa interaksi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga operasional.

Analisis Implementasi Berdasarkan Dimensi Transparansi

Transparansi mengacu pada kemampuan sistem pemerintahan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses kepada pihak yang berwenang.

Indonesia telah mengembangkan berbagai sistem pengawasan maritim seperti:

- Pusat Informasi Maritim Indonesia (IMIC).
- Sistem Identifikasi Otomatis (AIS).
- Layanan Lalu Lintas Kapal (VTS).
- Sistem Pengawasan Pesisir.
- Sistem Informasi Bakamla .

Namun, penelitian menunjukkan bahwa integrasi data antar platform masih menjadi tantangan. Beberapa data maritim masih disimpan dalam sistem terpisah, sehingga membatasi kemampuan analisis secara real-time.

Analisis Implementasi Berdasarkan Dimensi Kontrol

Kontrol berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk memantau dan mengendalikan aktivitas yang terjadi di wilayah maritimnya.

Sebagai negara dengan wilayah maritim sekitar 6,4 juta km², Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan maritim. Menurut Bakamla (2024), cakupan pengawasan elektronik nasional saat ini diperkirakan hanya mencakup sekitar 75–80% dari aktivitas maritim utama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada wilayah laut yang belum dipantau secara optimal, terutama di daerah perbatasan dan jalur pelayaran yang jauh dari pusat pemantauan.

Dalam menghadapi Perang Zona Abu-abu, kemampuan untuk mengendalikan wilayah maritim menjadi sangat penting karena ancaman sering muncul melalui aktivitas yang tampak legal tetapi memiliki tujuan strategis tertentu.

Tabel 1. Indikator Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia pada Tahun 2024

Indikator	Tanda
Wilayah Laut Indonesia	6,4 juta km ²
Jumlah Pulau	>17.000
Panjang Garis Pantai	108.000 km
Jumlah Kapal Internasional yang Lewat	>90.000 Kapal/Tahun
Liputan Pengawasan Elektronik	78%
Kasus Penangkapan Ikan Ilegal Dituntut Secara Hukum	412 Kasus
Insiden Siber Maritim	187 Insiden
Operasi Patroli Terpadu	1.356 Operasi
Pelabuhan Strategis Nasional	111 Pelabuhan
Kontribusi Ekonomi Maritim terhadap PDB	7,8%

Sumber: Bakamla RI (2024), KKP RI (2024), Kemenhub RI (2024), BSSN (2024), diolah peneliti.

Analisis Implementasi Berdasarkan Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menunjukkan kemampuan lembaga untuk bertanggung jawab atas implementasi kebijakan keamanan maritim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga maritim memiliki indikator kinerja yang jelas dan mekanisme evaluasi yang teratur. Namun, evaluasi tata kelola keamanan maritim masih dilakukan secara sektoral, sehingga tidak mencerminkan efektivitas sistem secara nasional.

Kondisi ini menyulitkan pengukuran tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman lintas sektor dan multidimensi dari Perang Zona Abu-abu.

Analisis Implementasi Berdasarkan Dimensi Kerahasiaan

Kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan informasi strategis yang berhubungan dengan keamanan nasional.

Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman siber terhadap sektor maritim menjadikan perlindungan data maritim sebagai prioritas utama. Berbagai sistem keamanan informasi telah dikembangkan oleh Badan Siber dan Kriptografi Nasional dan lembaga terkait. Namun, ancaman spionase siber dan intrusi siber terhadap infrastruktur maritim diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan digitalisasi sektor maritim nasional.

Analisis Implementasi Berdasarkan Dimensi Regulasi

Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mendukung tata kelola keamanan maritim, termasuk:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Urusan Maritim.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengiriman Barang.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Peraturan Presiden tentang Bakamla .
- Strategi Keamanan Maritim Nasional.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang secara khusus mengatur Peperangan Zona Abu-abu, Ancaman Hibrida Maritim, dan keamanan maritim digital masih relatif terbatas.

Dampak Perang Zona Abu-abu terhadap Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perang Zona Abu-abu memengaruhi semua dimensi keamanan maritim Christian Bueger .

Kekuatan Laut

Ancaman berupa milisi maritim, paksaan penjaga pantai, dan pelanggaran teritorial dapat mengurangi efektivitas pengendalian ruang maritim nasional.

Pembangunan Ekonomi

Gangguan pada pengiriman dan perdagangan berpotensi meningkatkan biaya logistik dan mengurangi investasi maritim.

Keamanan Manusia

Masyarakat pesisir dan nelayan adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak konflik maritim dan tekanan ekonomi.

Lingkungan Laut

Aktivitas ilegal dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya maritim.

Ringkasan Temuan Bagian II

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keamanan maritim Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengatasi ancaman maritim tradisional dan non-tradisional. Namun, sifat Perang Zona Abu-abu dan Ancaman Hibrida Maritim yang semakin kompleks menuntut transformasi tata kelola keamanan maritim yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

Kelemahan utama yang ditemukan meliputi fragmentasi kelembagaan, integrasi data yang terbatas, kesadaran domain maritim yang suboptimal, dan tidak adanya kerangka peraturan yang secara khusus mengatur ancaman hibrida maritim.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa **Perang Zona Abu-abu dan Ancaman Hibrida Maritim** telah menjadi tantangan utama bagi keamanan maritim Indonesia di era persaingan geostrategis global di kawasan Indo-Pasifik. Sifat ancaman ini, yang berada di bawah ambang batas konflik terbuka, membuatnya sulit dideteksi dan ditangani menggunakan pendekatan keamanan konvensional. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada pertahanan dan keamanan maritim, tetapi juga stabilitas ekonomi maritim, keamanan manusia, dan keberlanjutan lingkungan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keamanan maritim Indonesia telah mengalami kemajuan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran domain maritim, kerja sama regional, dan penguatan sistem pengawasan maritim nasional. Namun, berbagai tantangan masih tetap ada, termasuk kewenangan yang terfragmentasi antar lembaga, integrasi data maritim yang terbatas, ancaman siber maritim, dan regulasi yang kurang optimal yang secara khusus membahas peperangan zona abu-abu dan ancaman hibrida maritim. Berdasarkan pendekatan Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger, ancaman hibrida maritim berdampak pada semua dimensi keamanan maritim: Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut. Oleh karena itu, strategi untuk mengoptimalkan tata kelola keamanan maritim harus diimplementasikan secara terintegrasi

melalui penguatan Kesadaran Domain Maritim, transformasi digital maritim, diplomasi maritim, ketahanan ekonomi maritim, perlindungan lingkungan laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan keamanan maritim yang dikembangkan oleh Lukman Yudho Prakoso, yaitu integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun tata kelola keamanan maritim yang lebih adaptif, tangguh, dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 sebagai negara maritim yang kuat, aman, dan berdaya saing global. Pemerintah perlu mempercepat integrasi tata kelola keamanan maritim nasional dengan membangun **Kerangka Kerja Tata Kelola Keamanan Maritim Nasional** yang menghubungkan semua pemangku kepentingan maritim dalam satu sistem terpadu. Penguatan **kesadaran domain maritim berbasis kecerdasan buatan** perlu menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap peperangan zona abu-abu dan ancaman hibrida maritim. Selain itu, perlu memperkuat regulasi keamanan maritim digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber maritim, mengembangkan pelabuhan pintar nasional, dan memperluas kerja sama keamanan maritim regional dan internasional. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengembangkan **Indeks Ketahanan Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia** berbasis indikator kuantitatif sehingga dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kebijakan keamanan maritim nasional secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Badan Keamanan Laut Republik, I. (2024). *Laporan tahunan keamanan maritim Indonesia 2024*. Jakarta: Bakamla RI.
- Badan Pusat Statistik . (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). *Laporan ancaman siber nasional 2024*. Jakarta: BSSN.
- Bueger , C. (2015). Apa itu keamanan maritim? *Kebijakan Kelautan*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bueger , C., & Edmunds, T. (2017). Melampaui kebutaan laut : Agenda baru untuk studi keamanan maritim. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (edisi ke-5)*. Sage Publications.
- Hoffman, FG (2007). *Konflik di abad ke-21: Munculnya perang hibrida*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Biro Maritim Internasional. (2024). *Laporan tahunan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal tahun 2024*. Biro Maritim Internasional ICC.
- Organisasi Maritim Internasional. (2024). *Laporan keamanan maritim global 2024*. London: IMO.
- Kaplan, RD (2018). *Kembalinya dunia Marco Polo: Perang, strategi, dan kepentingan Amerika di abad ke-21*. Random House.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja pengawasan sumber hari Ketangkasan dan perikanan Tahun 2024*. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). *Statistik transportasi laut Indonesia tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Mazarr, MJ (2015). *Menguasai zona abu-abu : Memahami era konflik yang berubah*. US Army War College Press.

- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2018). Analisis data kualitatif: Buku sumber metode (edisi ke-4). Sage Publications.
- NATO Hybrid CoE . (2024). Laporan lanskap ancaman hibrida 2024. Helsinki: Pusat Keunggulan Hibrida NATO.
- Prakoso, LY (2019). Strategi keamanan Indonesia maritim dalam perspektif pertahanan negara. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2020). Implementasi kebijakan Keamanan maritim Indonesia. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2021). Geostrategi Indonesia maritim dalam dinamika Indo- Pasifik . Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2022). Transformasi Keamanan maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jakarta: Unhan Press.
- Prakoso, LY, Suhirwan , & Widodo, P. (2022). Tata kelola maritim dan implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia. Jurnal Studi Maritim dan Integrasi Nasional, 6(2), 101–115.
- Prakoso, LY, Putra, A., & Nugroho, D. (2023). Ketahanan maritim dan keamanan nasional di kawasan Indo-Pasifik. Jurnal Isu Keamanan dan Keberlanjutan, 13(1), 1–15.
- Prakoso, LY, & Putra, A. (2023). Transformasi digital dan ketahanan keamanan maritim di Indonesia. Jurnal Internasional Urusan Maritim dan Perikanan, 15(3), 45–61.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Kecerdasan buatan: Pendekatan modern (edisi ke-4). Pearson.
- Scott, D. (2019). Indo-Pasifik dalam strategi AS. Asia-Pacific Review, 26(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1622862>
- Till, G. (2018). Kekuatan Maritim : Panduan untuk Abad ke-21 (edisi ke-4). Routledge.
- Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. (2024). Tinjauan transportasi maritim 2024. Jenewa: UNCTAD.
- Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2024). Laporan penilaian ekosistem laut dan keberlanjutan 2024. Nairobi: UNEP.
- Bank Dunia. (2024). Prospek ekonomi global 2024: Perdagangan, logistik, dan ketahanan maritim. Washington, DC: Bank Dunia.
- Forum Ekonomi Dunia. (2024). Laporan risiko global 2024. Jenewa: Forum Ekonomi Dunia.
- Yin, RK (2018). Penelitian dan aplikasi studi kasus: Desain dan metode (edisi ke-6). Sage Publications.
- Zhang, H., & Lam, JSL (2022). Ketahanan maritim dan keamanan pelayaran global di kawasan Indo-Pasifik. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 161, 102705. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102705>